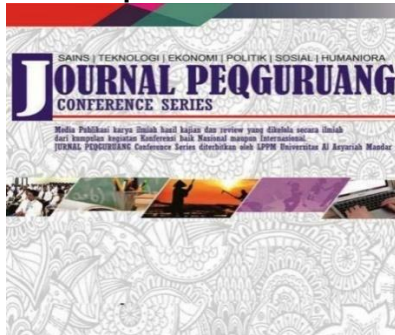


### Graphical abstract



## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENINGKATKAN AKSEBILITAS DESA DI KECAMATAN TUBBI TARAMANU

<sup>1\*</sup>Aspian, <sup>2</sup>Rustan IR, <sup>3</sup>Andriani  
<sup>1,2,3</sup>Univeristas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author  
[muhasfianmannan@gmail.com](mailto:muhasfianmannan@gmail.com)

### Abstract

This research aims to find out and describe the local government's policy in road infrastructure development in order to improve village accessibility in Tubbi Taramanu District, Polewali Mandar Regency. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants in this study consisted of the Head of Tubbi Subdistrict, Head of BAPPEDA Division, Bina Marga Division, Village Head, PUPR Office, and the Community. The results of this study indicate that village road development has become a priority of the local government, especially for remote areas such as Ratte Village, Besoangin, and North Besoangin. These efforts were carried out through the PUPR Office with budget support from the Regency APBD and Provincial APBD funds, as well as through participatory planning mechanisms such as development planning deliberations

**Keywords:** *Policy, Development, Road Infrastructure*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan aksesibilitas desa di Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini terdiri dari Camat Tubbi, Kabid BAPPEDA, Bidang Bina Marga, Kepala Desa, Dinas PUPR, Serta Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa telah menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama untuk wilayah terpencil seperti Desa Ratte, Besoangin, dan Besoangin Utara. Upaya tersebut dilaksanakan melalui Dinas PUPR dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten dan dana APBD provinsi, serta melalui mekanisme perencanaan partisipatif seperti musyawara perencanaan pembangunan.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur Jalan*

### Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6576

Received : 16-04-2026 | Received in revised form : 29-04-2026 | Accepted : 18-05-2026

## 1. PENDAHULUAN

Pada pidato Presiden pada 16 Agustus 2019, beliau Pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam struktur sosial masyarakat atau sistem yang ada. Pembangunan sering dipahami sebagai langkah untuk membawa perubahan dalam suatu negara atau pemerintahan menuju kondisi yang lebih modern, sebagai bagian dari upaya pembinaan bangsa (Siagian, 2009:23). Di Indonesia, proses perencanaan pembangunan diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menguraikan secara lengkap tahapan perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, beserta kewenangan yang melekat pada setiap tingkat pemerintahan terkait proses perencanaan tersebut. (Arruan Silomba, et al, 2021)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil dan terisolasi. Aksesibilitas yang baik sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. (Saadah, et al 2020)

Perencanaan pembangunan saat ini menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perencanaan juga merefleksikan sejauh mana pemerintah mematuhi dokumen perencanaan yang telah disusun. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan mencerminkan kepatuhan administrasi pemerintahan terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sangat bergantung pada kualitas dari perencanaan pembangunan yang dilakukan". (Walen, et al 2020). Berdasarkan pengertian perencanaan pembangunan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien (Rustan IR, 2023)

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, merupakan prasyarat untuk membuka akses terhadap berbagai layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pasar. Di banyak daerah terpencil, kurangnya infrastruktur sering kali menghambat mobilitas masyarakat, yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan perkembangan ekonomi lokal.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti Proyek Strategis Nasional dan berbagai program dana desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini terabaikan, sehingga aksesibilitas dapat ditingkatkan. Meskipun ada komitmen pemerintah, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya dana, masalah teknis, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan. Oleh karena itu, analisis kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini dan mencari solusi yang tepat. (Prasetyo dan Agung Dwi 2021)

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampak lingkungan. Kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga ekosistem dan mencegah kerusakan yang dapat terjadi akibat pembangunan yang tidak terencana.

Analisis kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan aksesibilitas di berbagai daerah.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan jalan, termasuk perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan. Undang-Undang ini menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan infrastruktur jalan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berasal dari objek yang tidak dapat diukur dengan angka atau metode kuantitatif lainnya. Dalam pendekatan ini, teori berperan sebagai panduan agar proses penelitian tetap berfokus pada kenyataan yang ditemukan di lapangan. Teori juga berfungsi sebagai latar konseptual untuk mendasari penelitian dan sebagai bahan dalam proses analisis. Dalam praktiknya, peneliti mengembangkan penelitian berdasarkan data yang dihimpun, dengan memanfaatkan teori sebagai rujukan. Hasil akhirnya adalah perumusan teori baru yang disimpulkan dari temuan dan pernyataan yang terkumpul selama proses penelitian berlangsung. Sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang ada di kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan peneliti memilih lokasi di Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar adalah karena wilayah ini memiliki beberapa desa terpencil yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas dan kondisi infrastruktur jalannya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan. Dalam konteks pembangunan, kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, **kebijakan** adalah

seperangkat keputusan, rencana, atau tindakan strategis yang dibuat oleh individu, kelompok, atau institusi yang memiliki kewenangan, dengan tujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan masalah tertentu dalam suatu lingkungan sosial, ekonomi, atau politik. Kebijakan menjadi panduan atau kerangka kerja dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau organisasi. (Kristian, I.2023)

Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan yang tertulis dalam bentuk peraturan atau dokumen resmi, tetapi juga dapat mencakup prinsip-prinsip tidak tertulis yang memengaruhi tindakan suatu pihak dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan seringkali diwujudkan dalam bentuk program pembangunan, peraturan perundang-undangan, ataupun keputusan administratif yang berdampak luas terhadap masyarakat. (Desrinelti, Afifah & Gistituati, R. 2021)

Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas desa. Infrastruktur jalan yang memadai menjadi fondasi penting untuk konektivitas wilayah, mempermudah masyarakat menuju pusat layanan seperti kesehatan dan pendidikan, serta memperlancar perputaran hasil pertanian ke pasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi Taramanu, kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat memainkan peran yang sangat penting. Kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, seperti yang diungkapkan oleh berbagai informan, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar desa. Melalui (APBD), dan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dukungan dari Pemerintah Provinsi, upaya ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat

Namun, meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan dan diimplementasikan, tantangan dalam pelaksanaannya masih sangat nyata. Banyak warga yang mengungkapkan kekecewaan terhadap kondisi jalan yang belum mendapatkan perhatian yang layak, terutama di desa-desa terpencil. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran dan prioritas pembangunan, di mana beberapa wilayah yang lebih mudah diakses justru mendapatkan lebih banyak perhatian dibandingkan dengan daerah yang lebih terisolasi.

Masyarakat juga turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan penting. Melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (Syahputra, R. 2020)

Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan proyek pembangunan dapat membantu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, sehingga kualitas pembangunan dapat terjaga, meskipun partisipasi masyarakat diakui sebagai elemen penting, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa warga merasa bahwa suara mereka tidak didengar dengan baik, dan usulan yang disampaikan melalui forum resmi sering kali tidak diindahkan. Hal ini menciptakan kesan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan sinergi yang lebih baik antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa alokasi anggaran dan prioritas pembangunan dilakukan secara adil dan merata. Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus aktif terlibat dalam proses pembangunan, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang berperan dalam menentukan arah dan isi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan, perlu ditetapkan indikator-indikator yang jelas dan terukur. Indikator ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka penulis menggunakan teori Menurut Sedarmayanti (2010:67) yang mencakup :

### **1. Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah merupakan aspek paling sentral dalam mendorong pembangunan infrastruktur jalan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah dalam sektor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas masyarakat desa terhadap fasilitas dan layanan dasar.

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dirancang dalam bentuk perencanaan strategis, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan proyek melalui dinas teknis seperti Dinas PUPR. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Menentukan pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini dapat dilihat dari adanya program pemeliharaan dan pembangunan jalan yang dilakukan setiap tahun, termasuk upaya memanfaatkan dana dari berbagai sumber seperti APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Namun, berdasarkan data lapangan, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar. Beberapa desa seperti Desa Besoangin, Besoangin Utara, Ratte, dan Piriang masih mengalami kondisi jalan

yang sangat memprihatinkan. Jalan yang rusak parah, berlubang, tidak beraspal, bahkan sebagian hanya berupa jalan tanah menjadi keluhan utama masyarakat. Ini menimbulkan dampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan akses ke fasilitas layanan kesehatan. Beberapa warga bahkan mengungkapkan bahwa pasien darurat harus ditandu berjalan kaki berjam-jam karena kendaraan tidak bisa menjangkau desa mereka.

Hasil wawancara dengan pihak pemerintah kecamatan dan Dinas PUPR menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan, keterbatasan anggaran serta faktor geografis menjadi kendala utama. Wilayah Tutar yang berbukit, terjal, dan rawan longsor membuat pembangunan jalan lebih kompleks dan membutuhkan biaya tinggi. Selain itu, dalam proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), tidak semua usulan masyarakat langsung diprioritaskan karena adanya keterbatasan anggaran dan kebijakan berbasis skala prioritas.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berhasil memenuhi prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Masih adanya ketimpangan infrastruktur antar desa menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa terpencil.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi Taramanu, partisipasi masyarakat terwujud dalam beberapa bentuk, baik secara formal maupun informal. (Huda, N., & Nugroho, R. 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, masyarakat setempat aktif mengikuti Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan jalan. Dalam forum tersebut, masyarakat mengusulkan titik-titik jalan yang rusak parah dan mendesak untuk diperbaiki. Mereka juga menyuarakan pentingnya akses jalan dalam menunjang aktivitas pertanian dan transportasi hasil produksi ke pasar.

Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat telah aktif menyampaikan aspirasi, tidak semua usulan mereka diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Beberapa informan menyampaikan bahwa ada rasa kecewa karena usulan perbaikan jalan dari tahun ke tahun tidak kunjung terealisasi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas atau simbolik, bukan sebagai elemen yang benar-benar menentukan arah kebijakan.

Di sisi lain, pada tahap pelaksanaan proyek, keterlibatan masyarakat juga terjadi, terutama dalam bentuk gotong royong, pengawasan pembangunan, dan pemberian masukan kepada pihak pelaksana di

lapangan. Masyarakat juga turut mengamati kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Mereka memperhatikan penggunaan bahan, waktu pengerjaan, dan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Partisipasi ini memberikan kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait jadwal pembangunan dan anggaran yang digunakan. Ini menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah jika hasil pembangunan tidak sesuai harapan.

Secara umum, partisipasi masyarakat di Kecamatan Tutar menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Akan tetapi, agar partisipasi ini menjadi efektif, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk benar-benar membuka ruang dialog yang substantif dan mempertimbangkan suara masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi Taramanu telah menjadi prioritas utama, terutama untuk desa-desa terpencil seperti Piriang, Ratte, Besoangin, dan Besoangin Utara. Pemerintah melalui Dinas PUPR dan dukungan anggaran dari APBD serta provinsi berupaya meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui musyawarah berjenjang, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan kawasan hutan lindung.

Pembangunan jalan yang dilakukan membawa dampak positif, terutama dalam mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dasar, distribusi hasil pertanian, serta membuka peluang ekonomi desa. Selain itu, partisipasi masyarakat turut memperkuat efektivitas pembangunan. Evaluasi berkala oleh instansi terkait diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Desrinelti, D., Afifah, A., & Gistituati, R. (2021). Kebijakan publik: Konsep, pelaksanaan, dan norma tidak tertulis dalam masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 75–89.

Huda, N., & Nugroho, R. (2022). Peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–57.

Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.

Prasetyo, A. D. (2021). Tantangan implementasi kebijakan infrastruktur di Indonesia: Tinjauan terhadap proyek strategis nasional. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45–57.

Rustan, I. R. (2023). Proses perencanaan pembangunan daerah berbasis pengembangan wilayah di Kabupaten Polewali Mandar.

Saadah, N., & Hanafiah. (2020). Peran pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 187–198.

Silomba, A., Massyat, M., & Tajuddin, M. S. (2021). Peran badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dalam proses perumusan kebijakan di Kabupaten Mamasa. *Jurnal Pegguruang*, 2.

Syahputra, R. (2020). Efektivitas forum musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(1), 22–33.

Walen, M. S., & Rustan, I. R. (2020). Peran badan perencanaan pembangunan, penelitian dan